

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPA HARAPAN (PUSAT
PANGAN SEHAT BERAGAM DAN PASTI AMAN) PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE**



OLEH :

A.DINI SYALSYABILA MAHARANI

E051 201 009

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPA HARAPAN (PUSAT
PANGAN SEHAT BERAGAM DAN PASTI AMAN) PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE**

Yang disusun dan diajukan oleh:

A.Dini Syalsyabila Maharani

E051 201 009

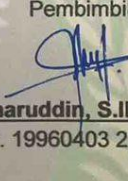
Yang akan dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.
NIP. 197901076 2005 01 1 001

Pembimbing II


Saharuddin, S.IP. M.Si.
NIP. 19960403 2022 04 3 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin


Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.
NIP. 197901076 2005 01 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Dini Syalsyabila Maharani
NIM : E051201009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPA HARAPAN (PUSAT
PANGAN SEHAT BERAGAM DAN PASTI AMAN) PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,


A. Dini Syalsyabila Maharani

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Implementasi Program Puspa Harapan (Pusat Pangan Sehat Beragam dan Pasti Aman Pada Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai tantangan akan tetapi semuanya itu dapat dilalui dengan baik. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si, selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan selaku Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif serta memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Saharuddin, S.IP., M.Si., selaku pembimbing II, yang selalu memberikan dorongan, arahan, bimbingan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Seluruh staf tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
7. Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone yang sudah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian.
8. Ayah dan Ibu, Ir. A. Mappangara Sebbu dan Syuhra Naningsih. Kedua sosok yang berperan sangat penting dalam kehidupan penulis yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, baik secara moral maupun materil kepada penulis.
9. Adik-adikku, A. Zahra Dwi Wulandari dan A. Asyifa Tri Wardhani.

Terima kasih untuk selalu menemani, membantu, dan menghibur penulis.

10. Ingke Ananda Arief , yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini kepada penulis. Terima kasih untuk selalu menghibur dan menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah. Terima kasih selalu menjadi *my one call away and thank you for being exist*.
11. Andi Reza Zulkarnain , teman seperjuangan yang selalu memberikan *advice* kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik yang selalu mendukung kegiatan yang penulis lakukan dan menjadi *supporter* ketika penulis mengalami masa sulit.
12. A. Dzaki Saputra, terima kasih karena telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah bersedia untuk menemani penulis dalam proses penelitian skripsi.
13. Andi Nur'azizah Lestari , St. Nurrahmania Salam , Muh. Danar Gemilang, dan Azzam Akram Aqilah. Terima kasih telah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan , yang menemani penulis dalam segala kegiatan selama berada di Ilmu Pemerintahan.
14. Squad Squidward, Andi Sutasya Dwi Asyura, Delyazri Wahyuliana , Ana Fardiah Syam, Ainiyyah Nugrayana Burhan, Putri Artika Sari, dan Ismi Ranti Putri. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik sejak 2012 hingga saat ini. Terima kasih telah memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis dan tidak pernah meninggalkan ketika

penulis sedang mengalami masa sulit.

15. Ajeng Amalia Putri dan Alya Rezky Alynda yang selalu menemani penulis sejak SMP hingga sekarang. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis.
16. Labbaikalah, Fazriel Ahmad Sukmawan, Dirga Yusdin, A. Muhammad Wahyu Syafutra, Muh. Habiburahman Al-Shirazy, Akhmad Akrar, Mohammad Ananda Ghiffary, Nilpa Triyana, Akila, Fidya, dan Meisya. Terima kasih selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
17. Fatin Yasmin Megawangi Riady , yang sejak SMA masih kebersamai penulis hingga saat ini. Terima kasih sudah memberikan semangat , doa, dan dukungan kepada penulis. Semoga kamu jadi dokter hebat.
18. Teman Posko 12, Nadilah Salsabila Erwin, Nur Hikmah, Yeni Simanullang, Abdul Choliz, Firmansyah Jaya Kusuma, dan Farhan Tahir, yang menjadi *partner* selama kurang lebih 1 bulan di rumah yang sama. Terima kasih selalu menjadi orang-orang yang pengertian, yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, dan tidak pernah membuat penulis kesepian selama kegiatan KKN berlangsung.
19. Deksay (Komisi V MDRR DPR RI) Rangga Akbar Fadliyan, Koes Andriati Putri, Irayana Sihotang, Rahmat Akbar, Rendy Arizal Radja Djingi, Rizky Nur Ichsan, Ulfa Aulia, Intan Kusuma Anggraeni, dan

Ihda Kurnia Masudah. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis selama 5 bulan berada di perantauan. Terima kasih untuk selalu menghibur, membantu, dan menjadi sahabat yang baik hingga saat ini.

20. Teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih telah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan.

21. Andi Achmad Ibrahim, yang selalu menjadi pendorong agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis. Tetap semangat dan sehat selalu.

22. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah berjuang sejauh ini *you did well*.

23. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan karya ilmiah ini, oleh karena itu penulis memohon maaf dan menghargai semua kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari setiap pihak yang membaca skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua.

Makassar, 20 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	1
ABSTRACT.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Implementasi Program.....	14
2.1.1. Konsep Implementasi	14
2.1.2. Konsep Program.....	20
2.1.3. PUSPA HARAPAN	23
2.2. Dinas Ketahanan Pangan.....	25
2.2.1. Definisi Dinas Ketahanan Pangan	25
2.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	26
2.3. Kerangka Konsep	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3. Tipe Penelitian	31
3.4. Informan Penelitian	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Sumber Data	34
3.7. Fokus Penelitian	35
3.8. Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	42
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone	47
4.1.3. Gambaran Umum Puspa Harapan	50
4.2. Hasil Penelitian Implementasi Program Puspa Harapan (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone	52
4.2.1. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan	56
4.2.2. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah	64
4.2.3. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	70
4.2.4. Komunikasi	77
4.2.5. Sumber Daya	82
4.2.6. Disposisi	90
4.2.7. Struktur Birokrasi	94
BAB V PENUTUP	101

5.1. Kesimpulan	101
5.2 .Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	109
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	109
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	110
Lampiran 3. Wawancara.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Bone Tahun 2023.....	44
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone	46
Tabel 4. 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone.....	48
Tabel 4. 4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kab.Bone.....	49
Tabel 4. 5. Lokus Puspa Harapan (Derah Rawan Pangan)	56
Tabel 4. 6. Program Puspa Harapan Beserta Hasil dan Dampak pada Kelompok Wanita Tani Kabupaten Bone	60
Tabel 4. 7. Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi	64
Tabel 4. 8 Potensi Pertanian pada Kecamatan.....	65
Tabel 4. 9. Pangan Lokal yang diprioritaskan dan Potensinya	68
Tabel 4. 10. Pola Pangan Harapan Kab.Bone	81
Tabel 4. 11. Susunan Tim Kerja Internal Pusat Pangan Sehat Beragam dan Pasti Aman (Puspa Harapan).....	83
Tabel 4. 12. Susunan Tim Kerja Internal berdasarkan kulifikasi pendidika.	84
Tabel 4. 13. Nama Tim Penyuluh Puspa Harapan.....	87
Tabel 4. 14. Alokasi Anggaran	93
Tabel 4. 15. Daftar Instansi yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Puspa Harapan	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Ketahanan Pangan Indonesia	5
Gambar 1. 2 Bupati Bone <i>Lauching</i> Puspa Harapan	9
Gambar 4. 1 Logo Puspa Harapan	51
Gambar 4. 2. Banner Stop Boros Pangan	75
Gambar 4. 3. Modul Makan Sehat, Minum Sehat, dan Pangan B2SA.....	75
Gambar 4. 4. Brosur Pedoman Gizi Seimbang (B2SA)	76
Gambar 4. 5. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Puspa Harapan.....	79
Gambar 4. 6. Rapat Internal Bersama Instansi-Instansi yang Terlibat dalam Pelaksanaan Puspa Harapan	81
Gambar 4. 7. Kunjungan Tim Studi (Instansi-Instansi) pada Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Puspa Harapan.....	92
Gambar 4. 8. SOP Pengajuan Bantuan P2L.....	99

ABSTRAK

A.Dini Syalsyabila Maharani, Nomor Induk Mahasiswa E051201009, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul : “**Analisis Implementasi Program Puspa Harapan (Pusat Pangan Sehat Beragam dan Pasti Aman) pada Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone**”, dibawah bimbingan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. dan Saharuddin, S.IP., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi program Puspa Harapan (Pusat Pangan Sehat Beragam dan Pasti Aman) pada Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone. Sementara jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Implementasi Program Puspa Harapan (Pusat Pangan Sehat Beragam dan Pasti Aman) di Kabupaten Bone menggunakan acuan Renstra BKP 2020-2024, yang telah berjalan dengan cukup baik akan tetapimasih perlu untuk ditingkatkan lagi terutama pada promosi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (2000) yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Kata Kunci : *Implementasi, Puspa Harapan, Rawan Pangan, Stunting,*

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone

ABSTRACT

A.Dini Syalsyabila Maharani, Student Identification Number E051201009, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepare a thesis with the title: "**Analysis of the Implementation of the Puspa Harapan Program (Center for Healthy Food with Diverse and Definitely Safe) at the Food Security Service in Bone Regency**", under the guidance of Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. and Saharuddin, S.IP., M.Si.

This research aims to examine and analyze the implementation of the Puspa Harapan program (Center for Healthy, Diverse and Definitely Safe Food) at the Food Security Service in Bone Regency and the factors that influence it.

The type of research used is qualitative research. The location of this research is the Food Security Service in Bone Regency. Meanwhile, the types of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews, literature study and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The research results show that the analysis of the implementation of the Puspa Harapan Program (Center for Healthy, Diverse and Definitely Safe Food) in Bone Regency uses the 2020-2024 BKP Strategic Plan as a reference, which has been running quite well but still needs to be improved, especially in promotion and education to the community. Meanwhile, the influencing factors use the theoretical approach proposed by George C. Edward III (2000) which consists of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.

Keywords : *Implementation, Puspa Harapan, Food Insecurity, Stunting, Food Security Service of Bone Regency*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu hak asasi bagi setiap manusia adalah pemenuhan pangan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Permasalahan akan kecukupan pangan menjadi masalah sensitif, yang dimana gejolak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari persoalan ini harusnya menjadi perhatian bagi *stake holder* dalam membuat kebijakan di bidang ketahanan pangan. Ditengah permasalahan di bidang pangan yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan pangan untuk konsumsi, harga pangan yang terkadang mengalami lonjakan drastis, kualitas produksi yang kurang.

Pangan yang berkualitas memegang peran krusial dalam mencapai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Pasalnya hal tersebut bisa mempengaruhi beberapa hal yang diantaranya: Pertumbuhan dan Perkembangan yang Optimal, Kesehatan dan

Kekebalan Tubuh, Mencegah Penyakit dan Masalah Kesehatan, Produktivitas dan Kesejahteraan Ekonomi, Ketahanan Pangan, Pendidikan dan Produktivitas, Peningkatan Kualitas Hidup, dan masih banyak lagi. Penting untuk diperhatikan bahwa pangan berkualitas bukan hanya masalah individu, tetapi juga memiliki dampak sistemik pada tingkat populasi. Oleh karena itu, upaya bersama dari pemerintah, produsen pangan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan berkualitas bagi semua.

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, Hal ini untuk menjaga agar kegiatan pembangunan di daerah tetap konsisten dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional (PP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan). Ketahanan pangan di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut undang-Undang PP No 17 Tahun 2015 tentang pangan, pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan. Dinas Badan Ketahanan Pangan yaitu Dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 ketahanan Pangan terdiri dari ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan pada 2022 lalu, tetapi jika dilihat lebih jauh ke belakang levelnya masih lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 - 2020. Hal ini terlihat dari data Global Food Security Index (GFSI) pada 2022 tercatat sebesar 60,2 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 59,2. Dalam 10 tahun terakhir GFSI terbaik Indonesia tercatat pada 2018.

GFSI mengukur ketahanan pangan negara-negara dari empat indikator besar, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (*quality and safety*), serta ketahanan sumber daya alam (*natural resources and resilience*). Indonesia terkenal sebagai negara agraris, artinya mayoritas tenaga kerja merupakan bekerja di sektor pertanian.



Gambar 1. 1 Indeks Ketahanan Pangan Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan pada Februari 2023 sebanyak 40,69 juta orang atau 29,36%

dari total pekerja. Dibandingkan Februari 2022 sebanyak 40,64 juta orang, kenaikannya juga tidak besar. Tetapi dibandingkan Februari 2021 penambahannya nyaris mencapai dua juta orang.

Data dari BPS menunjukkan sumbangan sektor pertanian kehutanan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 12,4%, di bawah industri pengolahan sebesar 18,34 persen, serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,85 persen. Pertumbuhannya pada 2022 hanya sebesar 2,25%, mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya masing-masing 1,87% dan 1,77%.

Rata-rata pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan dan perikanan di era Presiden Joko Widodo hanya 3,04%, turun dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 3,6%. Dengan mayoritas pekerja berada di sektor pertanian, pertumbuhan yang rendah tentunya berdampak pada kesejahteraan yang rendah. Hal ini tentunya berdampak pada belanja rumah tangga petani, yang juga rendah. Alhasil, pertumbuhan ekonomi pun sulit tinggi. Ironi negara lainnya yakni Indonesia lagi-lagi harus mengimpor beras. Bahkan, menjelang bulan Ramadhan lalu, isu beras kembali panas.

Namun, pada umumnya, ketahanan pangan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketahanan pangan di Indonesia

meliputi: Produksi Pangan, Infrastruktur, Kebijakan Pangan, Perubahan Iklim, Ekonomi, Keamanan Pangan, dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga.

Pemerintah Indonesia biasanya memiliki program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti program pertanian, distribusi pangan, dan pengembangan infrastruktur. Penting untuk merujuk ke sumber informasi terkini, seperti laporan pemerintah atau organisasi internasional terkait pangan, untuk memahami kondisi terbaru.

Ditengah ancaman El Nino, Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan upaya pemenuhan ketahanan pangan guna memastikan ketersediaan pangan di daerah ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). Hal ini dilakukan untuk memastikan keterpenuhan, ketersediaan, dan keterjangkauan sesuai instruksi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, mengatakan, GPM dilakukan sebanyak 36 titik yang tersebar di 24 kabupaten/kota sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan harga pangan.

Pada Hari Pangan Sedunia, Sulsel berada pada kondisi baik. Demikian halnya data inflasi yang menunjukkan hasil yang baik, berdasarkan data perkembangan inflasi pada bulan Agustus yang berada diangka 3,53 (MoM) sedangkan pada bulan September berada diangka 2,33 (MoM) atau selisih 1,0. Tentunya, sinergitas antara

Pemprov Sulsel dan Pemkab/Pemkot beserta jajaran Forkompimda dengan melakukan langkah - langkah terstruktur patut diapresiasi. Sejauh ini, ketersediaan pangan di Sulsel baik sisi produksi maupun sisi ketersediaan dalam posisi surplus. Produksi gabah tringgiling sekitar 5 juta atau kurang lebih 3 juta ton, sementara ketersediaan pangan berada pada kisaran 1,3 juta ton. Sedangkan kebutuhan berkisar 88 ribu ton atau masih surplus diangka 1,2 juta ton untuk ketersediaan stok beras.

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten Terbesar di Sulawesi Selatan. Dengan Jumlah Penduduk 813.211 jiwa. Pada tahun 2021. Dengan luas wilayah 4.559 Km². Wilayah kabupaten Bone tidak semuanya Kondisi ketahanan pangan ditinjau dari segi aspek ketersediaan pangan dalam kondisi surplus. Namun demikian masih terdapat wilayah-wilayah tertentu khususnya di daerahdaerah yang marginal karena keterbatasan akses masih mengalami kerawanan pangan prioritas I sekitar 16,3% (FSVA 2021). Selain itu kondisi stunting Kabupaten Bone masih cukup tinggi yaitu pada kisaran 34,1% (SSGI,2021). Isu stunting merupakan salah satu prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, dalam hal percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bone, oleh karena itu salah satu terobosan yang akan dilakukan yaitu melalui inovasi PUSPA HARAPAN (Puspa = Pusat Pangan, Harapan = Sehat, Beragam, Pasti Aman) yang

berangkat dari regulasi Keputusan Bupati Bone Nomor 188 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bone.



Gambar 1. 2 Bupati Bone *Lauching* Puspa Harapan

Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi *stake holder* terkait dalam mengintervensi wilayah stunting serta dengan mengoptimalkan pelayanan posyandu dan Pos KB Berkualitas, baik yang dilakukan melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Dengan keberadaan kegiatan ini, dapat menjadi Bunga Harapan Bangsa yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat melalui perubahan pola perilaku konsumsi sehat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

Dengan adanya inovasi ini masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA). Melalui kebun bibit/ Kebun PKK/ Kebun Sekolah. Puspa Harapan juga hadir dengan melibatkan ibu-ibu kader posyandu/ Penyulu KB dalam mengedukasi ibu-bu hamil yang datang ke posyandu melalui Modul Makan Sehat, Minum, Sehat, dan Modul B2SA. Selain

itu Ibu-Ibu yang membawa anaknya ke posyandu dapat juga memetik sayur untuk di bawah pulang, tanpa harus membeli. Puspa Harapan juga telah menjalin kemitraan dengan PEGADAIAN. Dimana dalam hal ini masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kelebihan sayuran untuk di konsumsi dijual melalui Pekarangan emas, dengan menabung hasil penjualan sayurannya dan nantinya bias ditukar menjadi Emas.

Di Kabupaten Bone ada 17 Kecamatan yang dijadikan lokus dalam pelaksanaan program Puspa Harapan ini antara lain, Kec.Kahu, Kec.Kajuara, Kecamatan Salomekko, Kec.Libureng, Kec.Sibulue, Kec.Barebbo, Kec.Cina, Kec.Ponre, Kec.Lamuru, Kec.Ulaweng, Kec.Palakka, Kec.Awangpone, Kec.Ajangale, Kec.Tanete Riattang, Kec.Tanete Riattang Barat, Kec.Tanete Riattang Timur, dan Kec.Amali.

Berdasarkan hasil peninjauan awal penelitian dan pemaparan di atas, masih ditemukan beberapa kendala bahwa implementasi program ketahanan pangan di Kabupaten Bone ini belum optimal. Hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang program Puspa Harapan yang merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dari program ini serta kejelasan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bone dibuat tidak menyeluruh.

2. Masih kurangnya sumberdaya manusia sebagai pelaksana yang mempunyai kesanggupan dalam menyampaikan informasi disertai dengan metode penyampaian yang menarik, unik dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat setempat yang belum memahami dan menyadari akan pentingnya pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan nilai gizi.
3. Serta masih kurangnya penyediaan lahan yang berkualitas dalam menunjang program ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa KWT (Kelompok Wanita Tani) yang mengalami kesulitan dalam menanam tanaman dimana tanaman yang di sudah ditanam seringkali tidak tumbuh dengan sempurna.

Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa implementasi program Puspa Harapan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone belum optimal dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Bone ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program PUSPA HARAPAN (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) di Kabupaten Bone?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program PUSPA HARAPAN (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) di Kabupaten Bone?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program PUSPA HARAPAN (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PUSPA HARAPAN (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) di Kabupaten Bone.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai implementasi program PUSPA HARAPAN (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) di Kabupaten Bone.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana implementasi program PUSPA HARAPAN (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) dalam

mengatasi permasalahan terkait ketahanan pangan di Kabupaten Bone.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, kemudian bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang berkaitan implementasi program PUSPA HARAPAN (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) di Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan lanjutan terkait dengan konsep dan teori-teori yang digunakan untuk memperjelas dalam menganalisis masalah penelitian secara detail dan jelas. Konsep dan teori-teori yang digunakan bersumber dari buku atau referensi lainnya.

2.1. Implementasi Program

2.1.1. Konsep Implementasi

Kamus Inggris Indonesia yang berjudul asli “An English Indonesian Dictionary” oleh Jhon M. Echols dan Hasan Shadily (1980: 313) menyatakan bahwa implementasi berasal dari kata *implementation* yang artinya pelaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga oleh Balai Pustaka (2005: 427) menyatakan implementasi artinya pelaksanaan dan penerapan.

Dalam kamus Webster (wahab, 2008) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to *implementation*” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Sedangkan pengertian lain berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI), *implementasi* adalah pelaksanaan atau penerapan.

Faktor–faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya

yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari

implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi

2.1.2. Konsep Program

Program merupakan perangkat data atau perencanaan yang dirumuskan dalam bentuk perencanaan-perencanaan

(Wikipedia.com). Pengertian secara umum, program diartikan sebagai “rencana”.

Dalam menentukan program ada tiga pengertian penting yang perlu ditekankan yaitu: (1) implementasi atau realisasi suatu kebijakan, (2) bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan terjadi pada waktu yang relatif lama, dan (3) terjadi dalam organisasi yang mengikutsertakan sekumpulan orang

Sedangkan Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (2012 : 11), Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai.

Menurut Tayibnapi 2008 (dalam Munthe 2015) “program ialah segala sesuatu yang dicobalakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Hal senada menurut Munthe “program ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan terjadi dalam proses kegiatan yang terus berlangsung/berkesinambungan dan melibatkan banyak orang”. Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang terencana secara sistematis, berkelanjutan untuk diimplementasikan dalam kegiatan

yang nyata dalam organisasi serta melibatkan banyak orang didalamnya.

Menurut Santosa dalam Soesanto (2011 : 17) program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Indikator keberhasilan dalam sebuah program dapat bervariasi tergantung pada tujuan, lingkup, dan sifat program tersebut. Berikut adalah beberapa indikator umum yang sering digunakan:

1. Mencapai Tujuan dan Sasaran: Keberhasilan program dapat diukur berdasarkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berhasil dicapai.
2. Peningkatan Kinerja: Pengukuran peningkatan kinerja atau efisiensi, seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, atau peningkatan layanan.
3. Kepuasan Pengguna: Tingkat kepuasan pengguna dapat menjadi indikator yang penting. Survei dan umpan balik pengguna dapat memberikan wawasan tentang seberapa baik program memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna.

4. Dampak Sosial: Program yang sukses juga bisa diukur melalui dampak positifnya terhadap masyarakat atau lingkungan, seperti peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kemiskinan, atau perbaikan lingkungan.
5. Inovasi: Keberhasilan program juga dapat diukur melalui tingkat inovasi yang dihasilkan, seperti pengembangan teknologi baru, penemuan baru, atau perbaikan proses.
6. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program dapat menjadi indikator keberhasilan, khususnya untuk program-program yang membutuhkan dukungan dari masyarakat.
7. Keberlanjutan: Keberhasilan program juga dapat dilihat dari sejauh mana program itu berkelanjutan dalam jangka panjang, termasuk kemampuan untuk mempertahankan dukungan finansial dan dukungan masyarakat.
8. Evaluasi Proses: Proses pelaksanaan program juga perlu dievaluasi. Keberhasilan dapat diukur dari seberapa baik program mengelola sumber daya, mematuhi aturan, dan menghindari kendala.

2.1.3. PUSPA HARAPAN

Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman (PUSPA HARAPAN) yang dikembangkan dilatarbelakangi oleh karena masih tingginya angka daerah rawan Pangan 16,3% (FSVA 2021) dan

angka Stunting 34,1% (SSGI,2021) dan inflasi yang fluktuatif di Kabupaten Bone. Program ini merupakan kolaborasi berbagai stake holder terkait.

Regulasi yang mendukung keberlanjutan PUSPA HARAPAN antara lain :

1. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
2. Keputusan Bupati Bone Nomor 188 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bone
3. Keputusan Bupati Bone Nomor 307 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Bone Tahun 2024
4. Keputusan Bupati pembentukan tim Kerja PUSPA HARAPAN
5. Edaran Bupati Bone Tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan
6. MOU dengan Pihak Sekolah terkait.

Memalui program ini mengoptimalkan peran multi sektor khususnya melalui intervensi spesifik dan sensitive. Program ini berdampak signifikan khususnya pada ibu-ibu masa kehamilan atau 1000 hari pertama kelahiran. Masyarakat khususnya ibu-ibu dapat mendekatkan gizi mereka melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Program PUSPA HARAPAN ini berhasil menurunkan wilayah rawan pangan yang ada di Kabupaten Bone (tidak adanya lagi wilayah

prioritas I di Tahun 2022) dan menurunkan angka stunting pada kisaran 27,8% Melalui program PUSPA HARAPAN, memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses pangan yang sehat beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA). untuk memudahkan Petugas posyandu dan petugas KB dibekali dengan Modul Makan sehat, minum sehat dan B2SA untuk menjadi acuan dalam pemenuhan gizi bagi masyarakat. Khususnya dapat membantu ibu-ibu yang memiliki penghasilan yang rendah dan menabung melalui program pekarangan Emas Kerjasama dengan Pegadaian.

2.2. Dinas Ketahanan Pangan

2.2.1. Definisi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan merupakan badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan kebijakan serta program yang berhubungan dengan ketahanan pangan di suatu wilayah.

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan di bidang ketahanan pangan.

Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat. Peran dinas ini sangat penting untuk memastikan keamanan pangan dan mengurangi risiko krisis pangan.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa : Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014). Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi program PUSPA HARAPAN (Pusat Pangan Sehat Beragam Pasti Aman) dalam menekan angka daerah rawan pangan dan angka stunting di Kabupaten Bone.

Kerangka Pikir Penelitian

